

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P.Parlindungan *“Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun”* CV. Mandar Maju Cetakan 1, Bandung, 1997
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia *“Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan Rakyat”*Jakarta, 2015
- Data Perumahan Di Kota Bandung, Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006,
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994,.
- Rizaldi Adiwira Mardi Putra, *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman”*, Skripsi Program Studi Magister Kenotariatan , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013,
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru : Bandung. 1983.
- Siswono Yudohusodo *“Rumah Untuk Seluruh Rakyat “* Bharakerta 1991
- Soedjajadi Keman, *Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Permukiman*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, Juli 2005.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981,

Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983,

Suparno Sastra M. Dan Endi Marlina, *Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan*, Jakarta : 2006.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Ecosoc

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,

Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan, Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang.

Sumber Lain

Adam Rizki Pratama, *“Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Di*

Kota Tangerang Selatan”, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, 2013,

Dede Suherlan, <https://M.Jabarnews.Com/Read/68947/Puluhan-Tahun-Pengembang-Di-Kota-Bandung-Belum-Serahkan-Psu>,

<https://M.Jabarnews.Com/Read/68947/Puluhan-Tahun-Pengembang-Di-Kota-Bandung-Belum-Serahkan-Psu>

<https://M.Jabarnews.Com/Read/68947/Puluhan-Tahun-Pengembang-Di-Kota-Bandung-Belum-Serahkan-Psu>

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/221140-Perencanaan-Pembangunan-Perumahan-Baru-D.Pdf>

<https://Terasjabar.Co/2019/02/01/Pemkot-Bandung-Akan-Tindak-Pengembang-Perumahan-Abaikan-Psu/>

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Rosana Selaku Sekretaris Bidang Pertanahan Di DPKP3 Bandung.

Wawancara Dengan Bapak Yanuar Selaku Seksi Bidang PSU Di DPKP3 Bandung, 16 Juli 2019.

Wawancara Dengan Bapak Yanuar Selaku Seksi Bidang PSU DPKP3 Kota Bandung.